

**PENGARUH PDRB, UPAH MINIMUM DAN JUMLAH  
PENDUDUK TERHADAP TINGKAT PARTISIPASI  
ANGKATAN KERJA PADA KABUPATEN/KOTA DI  
JAWA BARAT TAHUN 2007 - 2014**

**JURNAL ILMIAH**

**Disusun oleh :**

**Rindi Septian Prenggondani  
125020100111021**



**JURUSAN ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
MALANG  
2016**

**Pengaruh PDRB, Upah Minimum dan Jumlah Penduduk terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Pada Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2007 - 2014**

**Rindi Septian Prenggondani**

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya

Email: rindi.septian@gmail.com

**ABSTRACT**

*This study aimed to analyze the influence of the GRDP, Minimum Wages and Population on the Labour Force Participation Rate on District / City in West Java year 2007 - 2014. This study uses a quantitative approach. The data used in this research is secondary data in the form of panel data. Methods of data collection in this research is to find and merge secondary data from BPS data in 2007 - 2014. The dependent variable in this study is the Labor Force Participation Rate (LFPR), while Independent variables used is Gross Regional Domestic Product (GRDP), wages minimum and population. The results showed the GRDP and Population variables have a significant influence in a positive direction towards LFPR.*

*Keywords: Labor Force Participation Rate (LFPR), Gross Regional Domestic Product (GRDP), Minimum Wages and Population*

**ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh PDRB, Upah Minimum dan Jumlah Penduduk terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Pada Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2007 - 2014. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder dalam bentuk data panel. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan mencari dan menggabungkan data sekunder dari data BPS tahun 2007 - 2014. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Sedangkan Variabel independen yang digunakan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Upah Minimum, dan Jumlah Penduduk. Hasil penelitian menunjukkan variabel PDRB dan Jumlah Penduduk memiliki pengaruh yang signifikan dengan arah yang positif terhadap TPAK.*

*Kata kunci: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Upah Minimum, dan Jumlah Penduduk*

---

**A. PENDAHULUAN**

Masalah penduduk dan lapangan kerja selalu menjadi pokok perhatian pembangunan di tingkat nasional dan daerah. Persoalan-persoalan yang timbul daripadanya sudah sangat mendesak dan sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Masalah ini secara langsung dan tidak langsung menyangkut pertanyaan, sampai sejauh mana proses pembangunan dapat dinikmati oleh sebagian besar masyarakat dan sampai seberapa jauh bangsa kita mampu berpartisipasi sebagai pelaksana aktif dalam usaha menuju ke arah kemajuan. Suatu ekonomi yang berkembang pesat tidak hanya merupakan jaminan yang baik terhadap sulitnya mencari kerja di kalangan tenaga kerja, tetapi juga sangat penting untuk dapat menyerap tenaga-tenaga kerja baru yang setiap tahun memasuki pasaran kerja. Kurangnya

kesempatan kerja yang dapat disediakan oleh pemerintah dengan jumlah angkatan kerja yang semakin lama semakin bertambah akan menyebabkan jumlah pengangguran yang bertambah besar dan pada akhirnya akan menjadi beban pembangunan yang lebih berat. Dalam pada itu, masalah penduduk dan kesempatan kerja tidak dapat dan tidak boleh dianggap terpisah dari proses pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan pendapatan nasional riil perkapita dalam jangka panjang dengan dampak yang ditimbulkan dari proses pembangunan ekonomi nasional tersebut mempunyai kaitan erat dengan pembangunan ekonomi daerah, sebab daerah merupakan satu kesatuan bagian integral dari negara Indonesia.

Menurut Soeparmoko (2002) Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada, dengan menjalin pola-pola kemitraan antara pemerintah daerah dan pihak swasta guna penciptaan lapangan kerja, serta dapat merangsang pertumbuhan ekonomi di daerah yang bersangkutan. Keberhasilan pembangunan ekonomi daerah, sangat ditentukan oleh kebijakan-kebijakan pembangunan yang berlandaskan pada upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mampu menciptakan lapangan kerja secara optimal dari segi jumlah, produktivitas dan efisien. Pertumbuhan ekonomi diukur melalui tingkat produk domestik regional bruto (PDRB) di daerah. Semakin tinggi tingkat PDRB maka akan menghasilkan output yang diharapkan mampu menyerap tingkat partisipasi angkatan kerja baru di daerah. Selain hal tersebut, ketersediaan tenaga kerja juga sangat di butuhkan dalam menopang pembangunan, dengan ketersediaan tenaga kerja yang memadai maka rencana pembangunan lebih cepat terlaksana dengan baik. Tenaga kerja merupakan sumberdaya yang paling penting dalam proses pembangunan, karena dengan faktor produksi tenaga kerja yang melimpah maka kegiatan ekonomi akan lebih cepat berkembang dan mampu bersaing sehingga memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Meningkatnya jumlah penduduk menyebabkan semakin sempitnya lapangan pekerjaan yang pada akhirnya akan menimbulkan pengangguran. Jumlah angkatan kerja yang terus meningkat dari tahun ketahun diharapkan dapat memberikan pengaruh positif terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), baik itu dalam upaya mencari pekerjaan maupun dalam upaya membuka berbagai lapangan pekerjaan sehingga dapat menampung banyaknya jumlah tenaga kerja.

Masalah partisipasi angkatan kerja juga tengah dialami Provinsi Jawa Barat. Hal tersebut didasari karena Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia dengan pertumbuhan PDRB yang cukup tinggi di Pulau Jawa, namun disisi lain Provinsi Jawa Barat memiliki tingkat partisipasi angkatan kerja yang rendah di Pulau Jawa. Untuk dapat mengetahui tingkat PDRB dengan perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) selama tiga tahun yaitu dari tahun 2011 hingga tahun 2013 Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi lain di Pulau Jawa dapat kita lihat pada uraian data berikut.

**Tabel 1. PDRB Harga Konstan 2000 dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi di Pulau Jawa dan Indonesia tahun 2011 - 2013**

Provinsi	PDRB Harga Konstan 2000 (MilyarRupiah)			TPAK		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013
<b>DKI Jakarta</b>	422242.25	449805.42	477285.25	69.36	71.47	67.79
<b>Jawa Barat</b>	343193.56	364752.40	386838.84	62.27	63.64	62.82
<b>Jawa Tengah</b>	198270.12	210848.42	223099.74	70.77	71.26	70.43
<b>DI Yogyakarta</b>	22131.77	23308.56	24567.48	68.77	71.37	69.29

<b>Jawa Timur</b>	366983.28	393662.85	419428.45	69.49	69.60	69.78
<b>Banten</b>	94198.17	99992.41	105856.07	67.79	65.17	63.55
<b>Indonesia</b>	2364158.63	2512723.38	2661070.76	68.34	67.76	66.77

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) 2014

Menurut data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) sampai tahun 2013, yaitu tingkat PDRB Jawa Barat (dalam milyar rupiah) sebesar 343193.56 di tahun 2011, untuk tahun 2012 sebesar 364752.40 dan meningkat menjadi 386838.84 pada tahun 2013. Dari tabel diatas pertumbuhan tingkat PDRB Jawa Barat setiap tahun nilainya cukup tinggi dan tiap tahun nilainya terus meningkat, sama halnya dengan PDRB provinsi DKI Jakarta, dan Jawa Timur. Angka tersebut menempatkan provinsi Jawa Barat sebagai provinsi dengan pertumbuhan tingkat PDRB terbesar ketiga di Pulau Jawa. Namun, dengan tingginya PDRB Jawa Barat muncul permasalahan yaitu rendahnya angka tingkat partisipasi angkatan kerja.

Selanjutnya pertumbuhan ekonomi merupakan kunci dari tujuan ekonomi makro, dimana hal ini didasari oleh beberapa alasan diantaranya penduduk yang selalu bertambah yang berarti angkatan kerja juga akan bertambah. Hal yang kedua yaitu selama keinginan dan kebutuhan yang tidak ada batasnya maka perekonomian harus mampu memproduksi barang dan jasa, dan terakhir adalah mengenai usaha menciptakan pemerataan ekonomi melalui retribusi pendapatan yang akan lebih mudah dicapai dalam periode pertumbuhan ekonomi yang tinggi (Sarsi, 2014). Pertumbuhan ekonomi (PDRB) di provinsi Jawa Barat dapat kita lihat berdasarkan data dibawah ini.

**Tabel 2. PDRB Harga Konstan 2000 dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Jawa Barat tahun 2007 - 2014**

<b>Tahun</b>	<b>PDRB Harga Konstan (Juta Rupiah)</b>	<b>TPAK</b>
2007	261,161,703	62.50
2008	276,649,280	62.50
2009	290,650,775	62.89
2010	307,604,325	62.38
2011	327,559,826	62.27
2012	347,278,268	63.64
2013	368,388,711	62.82
2014	380.948.816	62,77

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) 2015

Dari data tersebut dapat kita lihat bahwa tingkat PDRB Harga Konstan 2000 Provinsi Jawa Barat terus meningkat selama delapan tahun terakhir. Hal tersebut menunjukkan PDRB Jawa Barat setiap tahun terus bertambah hingga mencapai 380.948.816 juta rupiah pada tahun 2014, namun hal tersebut tidak diikuti dengan tingkat partisipasi angkatan kerja yang meningkat, hal yang terjadi adalah

sebaliknya tingkat partisipasi angkatan kerja di Jawa Barat menurun sampai dengan 62.27 pada tahun 2011. Selanjutnya dari berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) salah satunya yaitu Upah Minimum, biasanya disebut dengan Upah Minimum Regional (UMR) yang merupakan suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pegawai, karyawan atau buruh di dalam lingkungan usaha atau kerjanya.

Peranan upah sangat penting dalam kelancaran perusahaan, karena salah satu faktor pendorong produktivitas menjadi lebih optimal merupakan sistem pengupahan dalam perusahaan. Seperti yang sering terungkap di media masa maupun elektronik, pemogokan kerja, unjuk rasa dan aksi sejenisnya sering terjadi yang disebabkan oleh sistem pengupahan yang dilakukan perusahaan belum dapat memberikan kepuasan kepada tenaga kerja. Penetapan upah ini dilakukan setiap tahun dengan proses yang panjang. Untuk mengetahui perkembangannya berikut dapat kita lihat data mengenai upah minimum di Provinsi Jawa Barat.

**Tabel 3. UMP dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Jawa Barat tahun 2007 - 2014**

<b>Tahun</b>	<b>UMP (rupiah)</b>	<b>TPAK</b>
2007	516.300	62.50
2008	568.200	62.50
2009	628.191	62.89
2010	671.500	62.38
2011	732.000	62.27
2012	780.000	63.64
2013	850.000	62.82
2014	1.000.000	62,77

Sumber : SK Gubernur Jawa Barat tentang penetapan UMP

Dari data diatas dapat kita lihat bahwa upah minimum di Provinsi Jawa Barat mengalami kenaikan setiap tahunnya, berawal dari tahun 2007 yang hanya Rp.516.300,- hingga mencapai Rp.1.000.000,- di tahun 2014. Penetapan upah minimum tersebut merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup pekerjanya, dan penentuan besarnya mengacu kepada terpenuhinya kebutuhan hidup layak (KHL). Dan dari data lima tahun terakhir tingkat upah minimum yang berada di tahun 2012 yaitunya sebesar Rp.780.000,- yang mempunyai jumlah penyerapan TPAK yang paling tinggi yaitu sebesar 63.64%.

Selain PDRB dan upah minimum, komponen yang mempengaruhi tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) adalah jumlah penduduk. Hal tersebut didasari bahwa jumlah penduduk yang makin besar telah membawa akibat jumlah angkatan kerja yang makin besar pula (Mulyadi, 2003). Ini berarti makin besar pula jumlah orang yang mencari pekerjaan atau menganggur. Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan Simanjuntak (1985) bahwa jumlah penduduk dan angkatan kerja yang besar serta laju pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak menjadi masalah, apabila daya dukung ekonomi yang efektif di negara itu cukup kuat memenuhi berbagai macam kebutuhan masyarakatnya termasuk penyediaan kesempatan kerja. Untuk dapat mengetahui perkembangannya berikut dapat kita lihat data mengenai jumlah penduduk di Provinsi Jawa Barat.

Tabel 4. **Pertumbuhan Jumlah Penduduk dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Jawa Barat tahun 2007 - 2014**

Tahun	Jumlah Penduduk	TPAK
2007	41.483.729	62.50
2008	42.194.869	62.50
2009	42.686.512	62.89
2010	43.227.107	62.38
2011	43.938.796	62.27
2012	44.643.586	63.64
2013	45.340.799	62.82
2014	46.029.668	62,77

Sumber : BPS Jawa Barat 2015

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Pertumbuhan Jumlah Penduduk Jawa Barat setiap tahun terus mengalami kenaikan dari tahun 2007-2014. Berbanding terbalik dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Jawa Barat yang mengalami fluktuasi antara tahun 2007-2014, hal tersebut menunjukkan tidak stabilnya angka TPAK pada periode tahun tersebut.

Alasan penulis memilih Provinsi Jawa Barat sebagai penelitiannya karena Jawa Barat mempunyai pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggi dengan tingkat PDRB yang cukup tinggi di Pulau Jawa, namun memiliki tingkat partisipasi angkatan kerja yang rendah dan terus menurun setiap tahunnya, sementara memiliki upah minimum dan PDRB yang terus meningkat setiap tahunnya. Inilah yang membuat Jawa Barat berbeda, dimana teori dan realita berhubungan negatif. Disamping itu Jawa Barat mempunyai pertumbuhan ekonomi yang bagus tetapi memiliki tingkat partisipasi angkatan kerja yang cukup rendah. Maka dari itu hal ini perlu diteliti lebih lanjut, berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Pengaruh PDRB, Upah Minimum dan Jumlah Penduduk terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Pada Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2007 - 2014”**, dan nantinya penelitian ini bisa sebagai acuan naskah akademik dalam pembuatan kebijakan dalam hal ketenagakerjaan. Dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh produk domestik regional bruto terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja di kabupaten/kota di Jawa Barat?
2. Bagaimana pengaruh upah minimum terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja di kabupaten/kota di Jawa Barat?
3. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja di kabupaten/ kota di Jawa Barat?

## B. KAJIAN PUSTAKA

### Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Menurut Simanjuntak (1985) tingkat partisipasi angkatan kerja adalah perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan penduduk usia kerja dalam kelompok yang sama. TPAK digunakan untuk mengindikasikan besaran persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu negara/wilayah. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

## **Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah.

Menurut Arsyad (1999) pertumbuhan ekonomi daerah diartikan sebagai kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak. Hal ini berarti bahwa pertumbuhan ekonomi daerah secara langsung ataupun tidak langsung akan menciptakan lapangan kerja.

## **Upah Minimum**

Menurut BPS, upah ialah imbalan yang diterima selama sebulan oleh buruh/karyawan baik berupa uang atau barang yang dibayarkan perusahaan/kantor/majikan. Imbalan dalam bentuk barang dinilai dengan harga setempat. Upah/ gaji bersih yang dimaksud tersebut adalah setelah dikurangi dengan potongan-potongan iuran wajib, pajak penghasilan dan sebagainya.

Pada umumnya upah tenaga kerja dibagi menjadi 2 jenis, yaitu upah nominal dan upah riil. Upah nominal merupakan upah yang diterima buruh atau karyawan sebagai balas jasa atas pekerjaan yang telah dilakukan, sementara upah riil merupakan gambaran daya beli dari pendapatan atau upah yang diterima buruh atau karyawan. Upah riil dihitung dari besarnya upah nominal dibagi Indeks harga konsumen.

## **Jumlah Penduduk**

Menurut BPS, Kondisi ketenagakerjaan baik menyangkut tingkat pengangguran dan penduduk yang bekerja tidak terlepas dari kinerja sektor-sektor perekonomian yang ada. Jumlah penduduk yang bekerja pada tiap sektor menunjukkan kemampuan sektor tersebut dalam penyerapan tenaga kerja. Situasi ketenagakerjaan dikatakan semakin membaik, apabila tersedianya jaminan kelangsungan pekerjaan bagi pekerja. Jumlah penduduk yang bekerja berdasarkan status pekerjaan juga menjadi salah satu indikasi kualitas tenaga kerja.

## **Teori Pertumbuhan Ekonomi**

Dornbusch, Fischer, dan Startz (2001) menyatakan bahwa output nasional (sebagai representasi dari pertumbuhan ekonomi disimbolkan dengan Y) merupakan fungsi dari modal fisik, tenaga kerja dan kemajuan teknologi yang dicapai. Faktor penting yang mempengaruhi pengadaan modal fisik adalah investasi, dalam arti bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi diduga akan membawa dampak positif terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja seperti ditunjukkan oleh model berikut:

$$Y = A.F(K,L)$$

Dalam model berikut, di mana Y adalah output nasional (kawasan), K adalah modal fisik (kapital), L adalah tenaga kerja, dan A merupakan teknologi. Y akan meningkat ketika input (K atau L, atau keduanya) meningkat. Faktor penting yang mempengaruhi pengadaan modal fisik adalah investasi. Y juga akan meningkat jika terjadi perkembangan dalam kemajuan teknologi yang terindikasi dari kenaikan A. Oleh karena itu, pertumbuhan perekonomian nasional dapat berasal dari pertumbuhan input dan perkembangan kemajuan teknologi yang disebut juga sebagai pertumbuhan total faktor produktivitas.

### **Teori Penciptaan Tenaga Kerja**

Teori penyerapan tenaga kerja lahir sebagai reaksi atas kritik terhadap teori pertumbuhan. Menurut teori ini, dalam kenyataannya dalam penerapan di negara-negara dunia ketiga telah melahirkan pengangguran. Latar belakang lahirnya pendekatan penciptaan tenaga kerja sebagai revisi atas teori pembangunan ini adalah hasil dari misi kunjungan dan studi badan PBB International Labour Organization (ILO) ke beberapa negara seperti Kolombia, Kenya dan Sri Langka, yang ternyata dengan penyerapan teori pembangunan, pertumbuhan di negara-negara tersebut selain mencapai pertumbuhan, juga pada saat yang sama naiknya angka pengangguran. Studi itu membuktikan bahwa pertumbuhan tidak serta merta menyelesaikan masalah pengangguran. Oleh karena itu disarankan agar kebijakan pertumbuhan haruslah diorientasikan pada penyerapan tenaga kerja (Mansour, 2001).

### **Teori Upah**

Menurut Simanjuntak (1985) kenaikan upah mempengaruhi penyediaan tenaga kerja melalui dua daya yang saling berlawanan. Kenaikan upah di satu pihak meningkatkan pendapatan (income effect) yang cenderung untuk mengurangi TPAK. Di pihak lain, peningkatan upah membuat harga waktu menjadi relatif mahal. Pekerjaan menjadi lebih menarik dan menggantikan waktu senggang (substitution effect). Daya substitusi dari kenaikan upah mendorong peningkatan TPAK.

### **Teori Standar Upah**

Menurut Mankiw (2011) peningkatan upah minimum ternyata akan meningkatkan jumlah pekerja. Menurut teori standar upah yang dikemukakan oleh Mankiw, bahwa ketika pemerintah meningkatkan atau mempertahankan upah agar tidak mencapai pada tingkat equilibrium, maka hal tersebut dapat menyebabkan peningkatan kekuatan upah yang akan menimbulkan peningkatan pada tingkat partisipasi angkatan kerja namun hal itu juga akan berdampak pada meningkatnya pengangguran terbuka. Hal tersebut terjadi ketika tingkat upah meningkat maka akan semakin banyak orang yang masuk ke dalam pasar tenaga kerja, sehingga jumlah angkatan kerja akan meningkat melebihi jumlah permintaan akan tenaga kerja yang disediakan, sehingga meningkatkan pengangguran.

### **Teori Kependudukan Malthus**

Dalam sebuah bukunya yang berjudul *essay on the principle of population* terbitan tahun 1798, Malthus merumuskan sebuah konsep tentang pertambahan hasil yang semakin berkurang. Malthus melukiskan suatu kecenderungan universal bahwa jumlah penduduk cenderung untuk meningkat secara geometris (deret ukur), sedangkan kebutuhan hidup riil dapat meningkat secara arismetik (deret hitung) (Todaro, 2006).

### **Teori Penduduk Durkheim**

Emile Durkheim mengatakan, akibat dari tingginya pertumbuhan penduduk, akan timbul persaingan diantara penduduk untuk dapat mempertahankan hidup. Dalam memenangkan persaingan tiap-tiap orang berusaha untuk meningkatkan pendidikan dan keterampilan, dan mengambil spesialisasi tertentu, keadaan seperti ini jelas terlihat pada kehidupan masyarakat perkotaan dengan kehidupan yang kompleks. Apabila dibandingkan antara kehidupan masyarakat tradisional dan masyarakat perkotaan, akan terlihat bahwa pada masyarakat tradisional tidak terjadi persaingan dalam memperoleh pekerjaan, tetapi pada masyarakat industri akan terjadi sebaliknya (Kurniawan, 2014).

## C. METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif. Hasil analisis dari metode kuantitatif adalah dalam bentuk angka yang kemudian diinterpretasikan dan dijelaskan dalam bentuk uraian.

### Jenis dan Sumber Data

Data merupakan sumber informasi yang diperoleh peneliti dalam penelitiannya. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang digunakan atau diterbitkan oleh organisasi yang bukan pengolahnya. Dalam hal ini data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat, dan instansi terkait lainnya.

### Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah bersumber dari bacaan yang diperoleh melalui BPS, jurnal, browsing internet, serta berbagai sumber buku-buku ekonomi yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

### Metode Analisis Data

Metode analisis menggunakan model uji statistik linier berganda dengan data panel. Dimana regresi linier berganda ini untuk menguji signifikan atau tidaknya hubungan lebih dari dua variabel melalui metode regresi. Dimana variabel terikat (Y) dan variabel bebas ( $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ ) Uji analisis ini digunakan untuk menganalisa hubungan antar variabel-variabel bebas dalam hal ini variabel Produk Domestik Regional Bruto (X1), Upah Minimum (X2), dan Jumlah Penduduk (X3) dengan variabel terikatnya dalam hal ini Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (Y).

## D. PEMBAHASAN

### Uji Hausman

Teknik pengujian yang digunakan adalah dengan Uji Hausman, dengan menggunakan correlated random effect. Dari hasil output untuk uji Hausman didapati bahwa pengujian menerima  $H_0$  dan menolak  $H_1$ , dikarenakan besarnya nilai cross-section random  $1.0000 >$  derajat signifikansi ( $\alpha$ ) sebesar 0.05%. Sehingga untuk model sementara menggunakan Fixed Effect Model (FEM).

### Uji Chow

Setelah itu pengujian dilanjutkan ke tahap selanjutnya untuk menentukan model yang terbaik antara fixed effect model atau common effect model. Teknik pengujian yang digunakan adalah dengan Uji Chow, Dari hasil output untuk Uji Chow didapati bahwa pengujian menerima  $H_0$  dan menolak  $H_1$ , dikarenakan besarnya nilai cross-section F  $1.0000 >$  derajat signifikansi ( $\alpha$ ) sebesar 0.05%. Sehingga untuk model menggunakan Common Effect Model.

### Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen).

Tabel 5. **Correlation Matriks**

	PDRB	Upah Minimum	Jumlah Penduduk
PDRB	1.000000	0.624604	0.753447
Upah Minimum	0.624604	1.000000	0.245818
Jumlah Penduduk	0.753447	0.245818	1.000000

Sumber : Eviews 8 (diolah)

Dari output di atas dapat dilihat bahwa tidak terdapat variabel yang memiliki nilai lebih dari 0,8, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas dalam model regresi.

### Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas merupakan uji yang menggunakan regresi variabel bebas terhadap nilai residual mutlaknya.

Tabel 6. **Heteroskedasticity Test : White Test**

F-statistic	0.274295	Prob. F(3,204)	0.8439
Obs*R-squared	0.835651	Prob. Chi-Square(3)	0.8409

Sumber : Eviews 8 (diolah)

Dari hasil Uji White pada model pertama dapat diketahui bahwa peneliti menerima H0 dan menolak H1, hal ini dikarenakan nilai Prob. Chi-Square 0.8409 > derajat signifikansi ( $\alpha$ ) sebesar 0.05%, sehingga tidak terdapat heterokedastisitas.

### Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi dilakukan untuk melihat korelasi antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut ruang atau waktu.

Tabel 7. **Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test**

F-statistic	0.765459	Prob. F(2,200)	0.4665
Obs*R-squared	1.572464	Prob. Chi-Square(2)	0.4556

Sumber : Eviews 8 (diolah)

Dapat diketahui bahwa peneliti menerima H0 dan menolak H1 dikarenakan nilai Prob. Chi-Square 0.4556 > derajat signifikansi ( $\alpha$ ) 0.05%. Sehingga tidak terdapat autokorelasi.

### Analisis Hasil Regresi

Tabel 8. **Hasil Estimasi Model Common Effect**

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PDRB	0.339122	0.125476	2.702683	0.0075
Upah Minimum	0.701331	0.517314	1.355716	0.1767
Jumlah Penduduk	10.50590	3.188769	3.294657	0.0012
<b>R-squared</b>	0.845871			
<b>F-statistic</b>	373.1898			
<b>Prob(F-statistic)</b>	0.000000			

Sumber : Eviews 8 (diolah)

### **Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa nilai koefisien determinasi sebesar 0.845871 (84%), sehingga besarnya pengaruh variabel independen PDRB, upah minimum, jumlah penduduk mempunyai pengaruh sebesar 84% terhadap variabel dependen TPAK. Sedangkan sisanya dijelaskan variabel lain di luar model.

### **Uji-F**

Dari hasil analisis regresi di atas didapati bahwa  $H_0$ : nilai F-statistik  $<$  Prob (F-statistik);  $H_1$ : F-statistik  $>$  Prob(F-statistik), dari hasil regresi di model pertama menunjukkan bahwa nilai F-hitung sebesar 25.25051  $>$  Prob(F-statistik) 0.00000 dengan tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) di bawah 0,05% sedangkan dari hasil regresi di model yang kedua juga menunjukkan bahwa nilai F-hitung sebesar 373.1898  $>$  Prob (F-statistik) 0.00000 dengan tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) di bawah 0.05%.

### **Uji-t**

Nilai t-hitung untuk variabel PDRB sebesar 2.702683 dan nilai probabilitas 0.0075 serta nilai standar error sebesar 0.125476, dikarenakan nilai probabilitas yang sangat signifikan dimana 0.0000  $<$  0.05 dengan demikian  $H_0$  diterima, maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel PDRB terhadap TPAK (*ceteris paribus*).

Nilai t-hitung untuk variabel upah minimum sebesar 1.355716 dan nilai probabilitas 0.1767 sedangkan nilai standar error sebesar 0.517314, dengan nilai signifikansi menghasilkan  $H_0$  dimana nilai probabilitas 0.0000  $>$  0.05, maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel upah minimum terhadap TPAK.

Nilai t-hitung untuk variabel jumlah penduduk sebesar 3.294657 dan nilai probabilitas 0.0012 sedangkan nilai standar error sebesar 3.188769, dengan nilai signifikansi menghasilkan  $H_0$  dimana nilai probabilitas 0.0000  $<$  0.05, maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel jumlah penduduk terhadap TPAK (*ceteris paribus*).

### **PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) TERHADAP TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK)**

Dari hasil regresi variabel PDRB ( $\log x_1$ ) diketahui jika  $H_0$ : nilai probabilitas  $>$  derajat signifikansi ( $\alpha$ );  $H_1$ : nilai probabilitas  $<$  derajat signifikansi ( $\alpha$ ). Dari hasil regresi pada model yang pertama variabel PDRB ( $\log x_1$ ) memiliki nilai probabilitas 0.0075, sehingga  $H_1$  diterima dan menolak  $H_0$  dan PDRB ( $\log x_1$ ) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen (y) TPAK. Sehingga jika dilihat dari hasil estimasi bahwa jika PDRB naik 1% maka pengaruhnya terhadap TPAK di Provinsi Jawa Barat akan meningkat sebesar 33%. Hal ini sesuai dengan hipotesis peneliti yang mengatakan bahwa PDRB ( $\log x_1$ ) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap variabel dependen TPAK (y).

Hal ini dikarenakan orientasi PDRB di Jawa Barat banyak diserap oleh sektor perdagangan, industri, dan pertanian, dimana sektor perdagangan menjadi sektor paling tinggi penyerapannya dalam menjalankan proses produksi. Menurut teori Sollow mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dalam hal ini PDRB tergantung kepada penyediaan faktor-faktor produksi (penduduk, tenaga kerja dan akumulasi modal) dan tingkat kemajuan teknologi. Hal ini sesuai dengan hipotesis peneliti yang mengatakan bahwa PDRB berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap variabel TPAK. Peningkatan PDRB ini sangatlah berpengaruh terhadap TPAK.

## **PENGARUH UPAH MINIMUM TERHADAP TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK)**

Dari hasil regresi variabel upah ( $\log x_2$ ) diketahui jika  $H_0$ : nilai probabilitas > derajat signifikansi ( $\alpha$ );  $H_1$ : nilai probabilitas < derajat signifikansi ( $\alpha$ ). Pada variabel upah ( $\log x_2$ ) memiliki nilai probabilitas 0.1767, sehingga  $H_0$  diterima dan menolak  $H_1$  sehingga variabel upah ( $\log x_2$ ) memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap variabel dependen (y) TPAK. Hal ini sesuai dengan pendapat Simanjuntak (1985) dikatakan bahwa kenaikan mempengaruhi penyediaan tenaga kerja melalui dua daya yang saling berlawanan. Kenaikan upah di satu pihak meningkatkan pendapatan (income effect) yang cenderung untuk mengurangi TPAK. Di pihak lain, peningkatan upah membuat harga waktu menjadi relatif mahal. Pekerjaan menjadi lebih menarik dan menggantikan waktu senggang (substitution effect). Daya substitusi dari kenaikan upah mendorong peningkatan TPAK.

Pengamatan menunjukkan bahwa hasil akhir dari dua daya tersebut yaitu income effect dan substitution effect tergantung dari tinggi rendahnya tingkat upah yang sedang berlaku. Dalam batas upah yang rendah, semua anggota keluarga yang mampu bekerja cenderung untuk dikerahkan masuk ke pasar kerja, sehingga TPAK relatif tinggi. Dalam batas upah sedang, income effect lebih kuat dari substitution effect, sehingga kenaikan cenderung untuk diikuti penurunan TPAK. Sehingga dalam hal ini pengaruh income effect jauh lebih dominan dari pada pengaruh substitution effect di Provinsi Jawa Barat periode 2007-2014.

## **PENGARUH JUMLAH PENDUDUK TERHADAP TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK)**

Dari hasil regresi variabel jumlah penduduk ( $\log x_3$ ) diketahui jika  $H_0$ : nilai probabilitas > derajat signifikansi ( $\alpha$ );  $H_1$ : nilai probabilitas < derajat signifikansi ( $\alpha$ ). Dari hasil regresi, variabel jumlah penduduk ( $\log x_3$ ) memiliki nilai probabilitas 0.0012, sehingga  $H_1$  diterima dan menolak  $H_0$  dan jumlah penduduk ( $\log x_2$ ) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen (y) TPAK. Setiap kenaikan seorang penduduk maka akan meningkatkan TPAK sebesar 105%.

Sementara menurut Malthus, Peningkatan jumlah penduduk jauh lebih cepat dari bahan makanan. Akibatnya upah riil akan turun, karena pertumbuhan penduduk menyebabkan biaya hidup yaitu biaya makanan naik. Ketika upah riil di suatu wilayah tinggi, maka akan mempengaruhi pengangguran akibat dari tingginya biaya kebutuhan hidup. Namun Malthus menjelaskan juga, Pertumbuhan penduduk mengindikasikan bahwa ketika upah riil akan turun, masyarakat akan enggan masuk ke pasar kerja, namun angka TPAK masih tinggi. Hal tersebut mempengaruhi peningkatan penyerapan tenaga kerja di Jawa Barat, dengan asumsi bahwa masyarakat akan mendorong anggota keluarganya untuk masuk ke pasar tenaga kerja untuk menghidupi kebutuhan hidupnya.

## **E. PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian hasil analisis diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Produk Domestik Bruto Regional (PDRB) di Provinsi Jawa Barat pada periode 2007-2014 dari hasil estimasi diketahui jika PDRB naik 1% maka pengaruhnya terhadap TPAK di Provinsi Jawa Barat akan meningkat sebesar 33%. Hal ini dikarenakan orientasi PDRB di Jawa Barat banyak diserap oleh sektor perdagangan, industri, dan pertanian, dimana sektor perdagangan menjadi sektor paling tinggi penyerapannya dalam menjalankan proses produksi.
2. Upah pada Provinsi Jawa Barat selama periode 2007-2014 memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap variabel TPAK. Hal ini dikarenakan ketika upah naik, maka perusahaan cenderung untuk mengurangi jumlah tenaga kerja. Hal tersebut menimbulkan sebagian tenaga kerja yang tidak terserap di sektor formal akan memilih bekerja di sektor informal. Jadi tingkat TPAK akan tetap tinggi di Provinsi Jawa Barat.

3. Jumlah penduduk di Provinsi Jawa Barat periode 2007-2014 memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel TPAK. Setiap kenaikan seorang penduduk, maka akan meningkatkan TPAK sebesar 105%. Hal ini dikarenakan peningkatan jumlah penduduk mendorong peningkatan jumlah angkatan kerja, artinya akan semakin banyak orang yang mencari pekerjaan. Pertumbuhan penduduk mengindikasikan bahwa upah riil akan turun. Ketika upah riil tersebut turun masyarakat akan enggan masuk ke pasar kerja, namun angka TPAK masih tinggi. Hal tersebut mempengaruhi peningkatan penyerapan tenaga kerja di Jawa Barat, dengan asumsi bahwa masyarakat akan mendorong anggota keluarganya untuk masuk ke pasar tenaga kerja untuk menghidupi kebutuhan hidupnya. Pertumbuhan penduduk Jumlah penduduk di Kabupaten/Kota Jawa Barat yang tinggi tidak menjadi masalah TPAK yang serius selama angkatan kerja yang ada mampu mengisi setiap lapangan pekerjaan yang ada.

### **Saran**

Berdasarkan dari hasil analisis serta kesimpulan yang telah dipaparkan maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Provinsi Jawa Barat diharapkan lebih mengoptimalkan keunggulannya terutama di sektor perdagangan, karena penduduknya lebih banyak terserap di sektor tersebut. salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan menambah investasi pada sektor perdagangan, sehingga sektor tersebut terus tumbuh dan menyerap lebih banyak tenaga kerja. Serta pemerintah menambah investasi lainnya pada sektor–sektor yang berorientasi padat karya.
2. Pemerintah Provinsi Jawa Barat diharapkan menambah investasi pada sektor informal yang berorientasi pada usaha di masyarakat, agar pencari kerja yang tidak terserap pada sektor formal mampu terserap di sektor informal. Agar peningkatan jumlah penduduk yang tinggi di Jawa Barat mampu mengisi setiap lapangan pekerjaan yang ada.

### **F. DAFTAR PUSTAKA**

- Arsyad, Lincoln. 1999. Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah Edisi I. Yogyakarta: Penerbit BPFE
- Badan Pusat Statistik. 2016. Kependudukan. <http://www.bps.go.id> diakses pada 5 Maret 2016
- Badan Pusat Statistik Jawa Barat. 2016. Jawa Barat dalam angka 2015. <http://www.jabar.bps.go.id> diakses 5 Maret 2016
- Badan Pusat Statistik Jawa Barat. 2015. Jawa Barat dalam angka 2014. <http://www.jabar.bps.go.id> diakses 5 Maret 2016
- Badan Pusat Statistik Jawa Barat. 2014. Jawa Barat dalam angka 2013. <http://www.jabar.bps.go.id> diakses 5 Maret 2016
- Fakih, Mansour. 2001. Sesat Pikir Teori Pembangunan dan Globalisasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kurniawan, Ari. 2014. Teori Kependudukan. <http://genbagus.blogspot.com> diakses pada 18 Maret 2016
- Mankiw, Gregory N. 2006. Makroekonomi Edisi 6, Jakarta : Penerbit Erlangga
- Mankiw, Gregory N. 2011. Pengantar Ekonomi Mikro. 3<sup>rd</sup> ed. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- S, Mulyadi. 2003. Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Sarsi, Wisna ; Putro, Tri Sukirno ; Sari, Lapeti 2014. Pengaruh Tingkat Upah dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Riau. Fakultas Ekonomi Universitas Riau, Pekanbaru. Vol. 1 No. 2 Oktober 2014.
- Simanjuntak, Payaman J. 1985. Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia. Jakarta: FEUI (Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia).
- Soeparmoko. 2002. Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah. Yogyakarta: Andi Edisi pertama.

- Todaro, Michael P. 2000. Pembangunan Ekonomi di Dunia Kelima, Edisi ketujuh, Jakarta: Bumi Aksara.
- Todaro, Michael P. 2006. Pembangunan Ekonomi edisi kesembilan, jilid 1. Jakarta: Erlangga

## LEMBAR PENGESAHAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL

Artikel Jurnal dengan judul :

### **PENGARUH PDRB, UPAH MINIMUM DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA PADA KABUPATEN/KOTA DI JAWA BARAT TAHUN 2007 - 2014**

Yang disusun oleh :

Nama : Rindi Septian Prenggondani  
NIM : 125020100111021  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Jurusan : S1 Ilmu Ekonomi

Bahwa artikel Jurnal tersebut dibuat sebagai *persyaratan ujian skripsi* yang dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 28 Juli 2016

Malang, 28 Juli 2016

Dosen Pembimbing,

Eddy Suprpto, SE., ME.  
NIP. 19580709 198603 1 002